

**INTEGRASI NILAI-NILAI PANCASILA KE DALAM MATA PELAJARAN  
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA  
PENDIDIKAN MORAL BAGI PESERTA DIDIK**

**(Studi Kasus di Kabupaten Karangayar Jawa Tengah)<sup>1</sup>**

**Triyanto<sup>2</sup>  
Triana Rejekiningsih<sup>3</sup>  
Utomo<sup>4</sup>**

Dipublikasikan dalam Prosiding Semnas LPP UNS, 03 Nop. 2012  
ISBN 978-602-99130-1-9

**ABSTRACT**

*The long-term goal of this research is to internalize the values of Pancasila to students through Civic Education. The specific goal to be achieved in this study is a model of integration of Pancasila values into Civic Education as a implementation of the Karanganyar Decree No. 421/2011 on Pancasila Education in School Curriculum.*

*The research used research and development method (R&D). R & D is a method of research that produces a product namely Integration Model of Pancasila Values into Civic Education as a Moral Education for Students. The steps of research consisted of: (1) identification of potential and problems, (2) data collection, (3) design of the model, (4) design validation, (5) revision of the design, (6) testing the model; (7) revising model; (8) trial of use; (9) revising the model, and (10) determination of the final model.*

*Civic Education Curriculum contained in KTSP 2006 (SD-SMA) very little to accommodate the values of Pancasila. Of the 52 Competency Standards, only four of which explicitly mentions the words Pancasila. Even, of the four, only two terms refer to the values of Pancasila.*

*Integration of Pancasila values into Civic Education is done by adding one hour of Civic Education for Pancasila Education into three hours from the beginning just two hours. Creating Pancasila as moral education is caused by the existence of moral decadence of teens. Moral education is done by determining the values of Pancasila are urged to teach in accordance with the real needs in the community are: (1) Obedience to God Almighty, (2) Respect for human dignity, (3) life harmony in diversity, (4) Deliberation with common sense and conscience are sublime, and (5) hard work and independent.*

**Keywords: *Integration; Pancasila Values; Civic Education.***

---

<sup>1</sup> Artikel Hasil Penelitian **HIBAH BERSAING**, dibiayai DIPA BLU FKIP UNS No. Kontrak 30/UN27.02/PL/2012 [07 MEI 2012], disampaikan pada Seminar Nasional Pengembangan Pendidikan diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan LPP UNS, di Surakarta, 03 November 2012.

<sup>2</sup> Dr., SH. MHum., Dosen Prodi PPKn FKIP Univ. Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta, HP. 08121501029, E-mail: [try\\_uns@yahoo.com](mailto:try_uns@yahoo.com).

<sup>3</sup> SH., KN., MPd. Dosen Prodi PPKn FKIP Univ. Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta.

<sup>4</sup> Drs., MPd., Dosen Prodi PPKn FKIP Univ. Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta.

## **PENDAHULUAN**

Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, falsafah hidup, dan ideologi negara sejak 18 Agustus 1945 merupakan salah satu budaya bangsa yang sangat penting yang perlu diwariskan kepada generasi muda melalui pendidikan. Oleh karena itu Pancasila perlu diwariskan kepada generasi muda melalui pendidikan. Tanpa usaha mewariskan Pancasila kepada generasi muda melalui pendidikan, negara dan bangsa akan kehilangan hasil budaya atau kultural sangat penting. Pendidikan di perguruan tinggi memegang peranan yang sangat penting untuk mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Era reformasi yang ditandai dengan jatuhnya rezim Soeharto membuat Pancasila semakin sulit dan marjinal dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Euforia demokrasi yang mengusung kebebasan cenderung kebablasan dan mengesampingkan aspek pendidikan moral. Pendidikan Pancasila yang dahulu dijadikan benteng moral bagi generasi muda telah 'dikerdilkan' ke dalam format Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang sarat dengan pendidikan demokrasi namun minim pendidikan moral. Dekandensi moral remaja akhir-akhir ini menyadarkan kita akan pentingnya 'menghidupkan' kembali Pendidikan Pancasila sebagai salah satu pilar bangsa sebagaimana diamanatkan oleh MPR-RI.

Permasalahannya, untuk mengembalikan Pendidikan Pancasila sebagai kurikulum di sekolah tidaklah mudah. Sejak berlakunya KTSP 2006, Pancasila sudah terlanjur 'dikerdilkan' ke dalam PKn. Tentunya bukan perkara mudah untuk merekonstruksi KTSP. Oleh karenanya, upaya yang paling realistis adalah mengoptimalkan integrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam PKn. Dalam konteks ini, Pemkab Karanganyar patut diapresiasi karena telah mengeluarkan SK Bupati No.421/2011 tentang Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Sekolah. Dalam SK tersebut ditegaskan bahwa setiap sekolah wajib mengajarkan Pendidikan Pancasila minimal satu jam per-minggu yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran PKn. Oleh karenanya, penelitian ini akan membuat model integrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam mata pelajaran PKn sebagai wahana pendidikan moral bagi peserta didik.

## KAJIAN TEORI

### A. Pancasila: antara cita dan fakta

Munculnya gelombang demokratisasi serta meningkatnya globalisasi membuat suatu ideologi menjadi kurang relevan dalam dunia tanpa batas. Jatuhnya rezim orde baru yang diikuti dengan krisis ekonomi dan politik semakin membuat ideologi Pancasila sebagai basis ideologis, *common platform*, dan identitas nasional bagi negara dan bangsa Indonesia seolah menjadi semakin kehilangan relevansinya. Para pejabat dan kaum intelektual kurang tertarik untuk membicarakan Pancasila karena khawatir akan dituduh antek orde baru.

Terdapat tiga faktor yang membuat Pancasila semakin sulit dan marginal dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. *Pertama*, Pancasila terlanjur tercemar karena kebijakan rezim Soeharto yang menjadikan Pancasila sebagai alat mempertahankan *status-quo* kekuasaannya. Rezim orde baru juga mendominasi pemaknaan Pancasila yang selanjutnya dilakukan indoktrinasi secara paksa melalui Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). *Kedua*, liberalisasi politik dengan penghapusan ketentuan oleh Presiden BJ Habibie tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam setiap organisasi (asas tunggal). Penghapusan ini memberi peluang bagi adopsi asas-asas ideologi lain, khususnya yang berbasiskan agama (*religious-based ideology*). Pancasila cenderung tidak lagi menjadi *common platform* dalam kehidupan politik. *Ketiga*, desentralisasi dan otonomi daerah yang sedikit banyak mendorong penguatan sentimen kedaerahan, yang jika tidak diantisipasi dapat menumbuhkan sentimen *local-nationalism* yang dapat tumpang tindih dengan *ethno-nationalism* (Azyumardi Azra, 2007).

Mengutip survei yang dilakukan aktivis Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (GMPI) tahun 2006, sebanyak 80 persen mahasiswa memilih syariah sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Sebanyak 15,5 persen responden memilih aliran sosialisme dengan berbagai varian sebagai acuan hidup. Hanya 4,5 persen responden yang masih memandang Pancasila tetap layak sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Penelitian itu dilakukan di Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, dan Universitas Brawijaya. Perguruan-perguruan tinggi tersebut selama ini dikenal sebagai basis gerakan politik di Indonesia. Survei tersebut menunjukkan semakin rendahnya semangat nasionalisme di kalangan generasi penerus bangsa. Banyak generasi muda yang lupa isi harfiah Pancasila. Apalagi mengerti Pancasila secara maknawi (*Kompas*, 4/3/2008).

Kompas, edisi 1 Juni 2008 melaporkan hasil survei yang dilakukannya pada tanggal 28 s/d 29 Mei 2008 melalui telepon pada 835 responden berusia 17 tahun ke atas yang dipilih acak, dari Buku Petunjuk Telepon beberapa kota yaitu di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Padang, Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Manado, dan Jayapura. Hasil survei Kompas tersebut menunjukkan bahwa 48,4% responden berusia 17-29 tahun menyebutkan kelima sila Pancasila salah atau tidak lengkap, 42,7% responden berusia 30-45 tahun salah menyebutkan kelima sila Pancasila, dan responden berusia 46 tahun ke atas lebih parah lagi, yakni sebanyak 60,6% salah menyebutkan kelima sila Pancasila. Dari kelima sila Pancasila, ternyata sila keempat merupakan sila yang paling banyak dilupakan orang. Menurut survei Kompas, sebanyak 39,4% responden salah menyebutkan sila yang menjadi dasar kehidupan demokrasi tersebut. Sila pertama yang paling tepat disebutkan yakni sebanyak 81,6%. Hanya 12,3% yang salah menyebutkan.

## **B. Pendidikan karakter (*character education*)**

Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan (*cognitive*), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*). Menurut Thomas Lickona, tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif, dan pelaksanaannya pun harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Dengan pendidikan karakter, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi adalah bekal terpenting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan, karena dengannya seseorang akan dapat berhasil dalam menghadapi segala macam tantangan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis (Williams dan Megawangi, 2009).

Karakter bangsa memiliki peran penting dalam menentukan kekuatan dan kemampuan bangsa untuk mencapai tujuan pembangunan. Karakter bangsa adalah unsur penting bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa. James Madison, salah satu peletak dasar konstitusi Amerika Serikat, pernah menyatakan bahwa, "*the character of a nation is determined by the character of its people*" atau karakter yang dimiliki suatu bangsa ditentukan oleh karakter warga negaranya. Komponen utama dari karakter bangsa adalah tata nilai (*values*) yang dibangun dan ditumbuhkembangkan oleh para warga negaranya. Oleh karena itu, keberhasilan atau kegagalan sebuah bangsa menjadi sangat tergantung pada upaya pembinaan dan pembangunan karakter warga negaranya (Hatta Rajasa, 2009: 1).

Pembinaan moral dan karakter bangsa sangat terkait erat dengan peningkatan kualitas pembangunan pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, maka pemerintah telah bertekad untuk menjadikan pendidikan menjadi landasan utama dalam pembinaan dan penumbuhkembangan karakter positif bangsa. Untuk itu maka pemerintah telah menetapkan bahwa pembangunan pendidikan harus diarahkan pada tiga hal pokok, yaitu (Mensetneg Hatta Rajasa, 2009: 6): *Pertama*, pendidikan sebagai sarana untuk membina dan meningkatkan jati diri bangsa untuk mengembangkan seseorang sehingga sanggup mengembangkan potensi yang berasal dari fitrah insani, dari Allah Swt. Pembinaan jati diri akan mendorong seseorang memiliki karakter yang tangguh yang tercermin pada sikap dan perilakunya. Tanpa adanya jati diri, suatu bangsa akan mudah terombang-ambing dan kehilangan arah dari terpaan tantangan globalisasi yang bergerak cepat dewasa ini.

*Kedua*, pendidikan sebagai media utama untuk menumbuhkembangkan kembali karakter bangsa Indonesia, yang selama ini dikenal sebagai bangsa yang ramah tamah, bergotong-royong, tangguh, dan santun. Sehingga apabila karakter ini dapat kita bangun kembali, kita perkuat, maka diharapkan kita akan mampu menghadapi setiap krisis dan tantangan masa depan.

*Ketiga*, pendidikan sebagai tempat pembentukan wawasan kebangsaan, yaitu perubahan pola pikir warga bangsa yang semula berorientasi pada kesukuan menjadi pola pikir kebangsaan yang utuh. Melalui wawasan kebangsaan dapat dibangun masyarakat yang saling mencintai, saling menghormati, saling mempercayai, dan bahkan saling melengkapi satu sama lain, dalam menyelesaikan berbagai masalah pembangunan.

### **C. Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan karakter**

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada hakikatnya merupakan pendidikan yang mengarah pada terbentuknya warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Secara konseptual-epistemologis, PKn dapat dilihat sebagai suatu *integrated knowledge system* (Hartoonian, 1992: 160-163) yang memiliki misi menumbuhkan potensi peserta didik agar memiliki pengetahuan, sikap, dan ketrampilan sebagai warga negara yang berwatak dan berperadaban baik (Udin S. Winataputra, 2001: 131).

Pendidikan Kewarganegaraan dan pendidikan karakter (*character education*) merupakan dua hal yang berkaitan erat sehingga muncul istilah *character and citizenship education*. PKn dan pendidikan karakter merupakan suatu konsep inklusif yang membahas segala aspek tentang

bagaimana lingkungan sekolah dapat mendukung pengembangan karakter positif terhadap siswa, staff, dan para *stakeholders*. Semua kegiatan ini tercermin dalam semua kegiatan sekolah dalam bentuk kurikulum, tata tertib, maupun kegiatan ekstrakurikuler. Pada dasarnya semua sekolah telah menerapkan pendidikan karakter meskipun tidak secara eksplisit disebut pendidikan karakter (*Alberta School*, 2005: 2). Pendidikan karakter tidak mungkin dipisahkan dari dari sistem pembelajaran yang ada di sekolah itu sendiri. Permasalahannya adalah adanya kesulitan seorang guru untuk secara efektif mengembangkan karakter positif kepada siswanya (Williams, 2000: 34).

Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu wujud dari pendidikan karakter yang mengajarkan etika personal dan nilai-nilai/akhlak kebajikan (Best, 1960: Udin S. Winataputra, 2001: 127). Pendidikan kewarganegaraan merupakan sebuah proses untuk membentuk karakter individu menjadi warga negara yang baik dan cerdas atau *smart and good citizen* (Cogan and Derricot, 1998: 2). Pendidikan kewarganegaraan dapat dijadikan sebagai sarana pembangunan karakter bangsa (*nation character building*) (Sapriya, 2005: 4).

#### **D. Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)**

Sebelum Dekrit Presiden tahun 1959 di SMU dikenal mata pelajaran Tata Negara, Tata Hukum dan Ilmu Kewarganegaraan. Setelah Dekrit diperkenalkan mata pelajaran “*Civics*” dengan “*Civics* Manusia Indonesia Baru” dan “Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi (Tubapi)” sebagai buku sumber. Atas anjuran Menteri Kehakiman Dr.Suhardjo,SH., istilah *Civics* diganti “Kewargaan Negara” pada tahun 1962. Kemudian pada tahun 1968, istilah Kewargaan Negara diganti dengan “Pendidikan Kewargaan Negara (PKn)”, yang berkecenderungan pada aspek Tata Negara dan sejarah, tanpa menampakkan aspek moralnya. Untuk itu, pada tahun 1973 MPR hasil pemilihan umum berhasil menetapkan GBHN yang menginstruksikan adanya Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di semua jenjang sekolah. Untuk memperkaya materi PMP, pada tahun 1978 ditetapkanlah Eka Presetya Pancakarsa atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan pada tahun 1983 ditambah pula dengan materi Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Pada tahun 1994 PMP berganti nama menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) (Daryono, *et al.*, 2008: 6-7).

Setelah reformasi tepatnya mulai tahun 2006, pada jenjang SD hingga SMA diberlakukanlah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dimana mata pelajaran PPKn

berubah nama menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Standar Isi mata pelajaran PKn berdasarkan KTSP secara lengkap dapat dilihat pada bagian lampiran.

Menurut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 (Permendiknas No.22/2006), PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Ruang lingkup mata pelajaran PKn meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

- 1) *Persatuan dan Kesatuan bangsa*, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan.
- 2) *Norma, hukum dan peraturan*, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistem hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional.
- 3) *Hak asasi manusia* meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
- 4) *Kebutuhan warga negara* meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, Persamaan kedudukan warga negara.
- 5) *Konstitusi Negara* meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dengan konstitusi.
- 6) *Kekuasaan dan Politik*, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi.

- 7) *Pancasila* meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.
- 8) *Globalisasi* meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi.

### **E. Penelitian Sebelumnya**

Pada tahun 2009-2010, peneliti telah memenangkan hibah penelitian kerjasama antar perguruan tinggi (Hibah Pekerti) bekerjasama dengan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Penelitian tersebut telah menghasilkan suatu model pembelajaran tentang Pancasila di Perguruan tinggi yang kami berinama dengan “*Challenging Models of Learning Pancasila*” (model-model yang menantang dalam mempelajari Pancasila). Model ini punya dua metode utama yaitu *debating groups* (debat kelompok) dan *facts finding* (pencarian fakta). Dengan metode ini mahasiswa dapat mengoptimalkan semua aspek pembelajaran yang terdiri dari kognitif, afektif dan psikomotorik (Triyanto, 2010).

Pendidikan karakter berdampak pada keberhasilan akademik sebagaimana hasil penelitian Dr. Marvin Berkowitz dari University of Missouri- St. Louis, menunjukkan peningkatan motivasi siswa sekolah dalam meraih prestasi akademik pada sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan karakter. Kelas-kelas yang secara komprehensif terlibat dalam pendidikan karakter menunjukkan penurunan drastis pada perilaku negatif siswa yang dapat menghambat keberhasilan akademik (Williams dan Megawangi, 2009).

Sebuah buku yang berjudul *Emotional Intelligence and School Success* (Joseph Zins, et.al, 2001: 38-39) mengkompilasikan berbagai hasil penelitian tentang pengaruh positif kecerdasan emosi anak terhadap keberhasilan di sekolah. Dikatakan bahwa ada sederet faktor-faktor resiko penyebab kegagalan anak di sekolah. Faktor-faktor resiko yang disebutkan ternyata bukan terletak pada kecerdasan otak, tetapi pada karakter, yaitu rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, kemampuan bergaul, kemampuan berkonsentrasi, rasa empati, dan kemampuan berkomunikasi.

Hal ini sesuai dengan pendapat Daniel Goleman (2002: xiii-xiv) tentang keberhasilan seseorang di masyarakat, ternyata 80 persen dipengaruhi oleh kecerdasan emosi, dan hanya 20

persen ditentukan oleh kecerdasan otak (IQ). Anak-anak yang mempunyai masalah dalam kecerdasan emosinya, akan mengalami kesulitan belajar, bergaul dan tidak dapat mengontrol emosinya. Anak-anak yang bermasalah ini sudah dapat dilihat sejak usia pra-sekolah, dan kalau tidak ditangani akan terbawa sampai usia dewasa. Sebaliknya para remaja yang berkarakter atau mempunyai kecerdasan emosi tinggi akan terhindar dari masalah-masalah umum yang dihadapi oleh remaja seperti kenakalan, tawuran, narkoba, minuman keras (miras), perilaku seks bebas, dan sebagainya.

Pendidikan karakter di sekolah sangat diperlukan, walaupun dasar dari pendidikan karakter adalah di dalam keluarga. Kalau seorang anak mendapatkan pendidikan karakter yang baik dari keluarganya, anak tersebut akan berkarakter baik selanjutnya. Namun banyak orang tua yang lebih mementingkan aspek kecerdasan otak ketimbang pendidikan karakter. Selain itu Daniel Goleman juga mengatakan bahwa banyak orang tua yang gagal dalam mendidik karakter anak-anaknya entah karena kesibukan atau karena lebih mementingkan aspek kognitif anak. Namun ini semua dapat dikoreksi dengan memberikan pendidikan karakter di sekolah.

Jadi, pendidikan karakter atau budi pekerti plus adalah suatu yang mendesak (*urgent*) untuk dilakukan. Kalau kita peduli untuk meningkatkan mutu lulusan SD, SMP, SMU dan perguruan tinggi, maka tanpa pendidikan karakter adalah usaha yang sia-sia. Mahatma Gandhi memperingatkan tentang salah satu tujuh dosa fatal, yaitu “*education without character*”(pendidikan tanpa karakter). Dr. Martin Luther King juga pernah berkata: “*Intelligence plus character....that is the goal of true education*” (Kecerdasan plus karakter....itu adalah tujuan akhir dari pendidikan sebenarnya). Juga Theodore Roosevelt yang mengatakan: “*To educate a person in mind and not in morals is to educate a menace to society*” (Mendidik seseorang dalam aspek kecerdasan otak dan bukan aspek moral adalah ancaman mara-bahaya kepada masyarakat). (Williams dan Megawangi, 2009).

Pada tahun 2011, ketua peneliti pernah diminta oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar untuk memberikan masukan terhadap Implementasi SK Bupati No. 421/2011 tentang Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Sekolah. Untuk itu, kami menindaklanjutinya dengan mengajukan proposal ini guna membantu Pemkab Karanganyar dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam mata pelajaran PKn. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif wahana pendidikan moral sekaligus sebagai respon atas dekadensi moral generasi muda yang terjadi akhir-akhir ini.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (*research and development*). Metode penelitian ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu berupa model integrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam mata pelajaran PKn. Langkah-langkah penelitian dan pengembangan secara berurutan terdiri dari: (1) identifikasi potensi dan masalah; (2) pengumpulan data; (3) desain model; (4) validasi desain; (5) revisi desain; (6) ujicoba model; (7) revisi model; (8) ujicoba pemakaian; (9) revisi model; dan (10) penetapan model final.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Eksistensi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kurikulum PKn

Berdasarkan KTSP, mata pelajaran PKn di SD-SMA memiliki 52 Standar Kompetensi (SK). Dari 52 SK tersebut, hanya terdapat empat SK yang secara eksplisit atau tegas menyebut kata “Pancasila”. Bahkan dari keempat SK tersebut hanya dua SK yang membahas nilai-nilai Pancasila. Keempat SK tersebut adalah:

**Tabel 1. Nilai-Nilai Pancasila dalam KTSP PKn SD-SMA**

No	Standar Kompetensi	Jenjang
1	Menampilkan <b>nilai-nilai Pancasila</b>	Kelas II, Semester 2
2	Menghargai nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara	Kelas VI, Semester 1
3	Menampilkan perilaku yang sesuai dengan <b>nilai-nilai Pancasila</b>	Kelas VIII, Semester 1
4	Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka	Kelas XII, Semester 1

Ada beberapa SK yang relevan dengan nilai-nilai Pancasila misalnya tentang kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, dan kegotongroyongan. Akan tetapi KTSP PKn tidak secara spesifik menempatkan Pancasila sebagai pendidikan moral. KTSP lebih menempatkan PKn sebagai pendidikan demokrasi yang mengajarkan kebebasan, globalisasi, sistem pemerintahan dan lain-lain. Akibatnya siswa sekarang sangat minim sekali memperoleh pendidikan moral di sekolah.

Perubahan paradigma PKn menjadi pendidikan demokrasi telah mengakibatkan kemerosotan moral generasi muda. Generasi mudah telah keliru menerjemahkan demokrasi sebagai kebebasan tanpa batas sehingga mereka sering melanggar norma-norma ketimuran dengan melakukan berbagai tindakan pelanggaran norma seperti kekerasan, pornografi/pornoaksi, kemerosotan moral dan etika dan lain-lain.

Atas dasar inilah Pemerintah Daerah Kabupaten Karangnyar berinisiatif untuk kembali menghidupkan pendidikan Pancasila berdasarkan SK Bupati No.421/2011 tentang Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Sekolah. Dalam SK tersebut ditegaskan bahwa setiap sekolah wajib mengajarkan Pendidikan Pancasila minimal satu jam per-minggu yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran PKn. Pengintegrasian ke dalam PKn dikarenakan tidak mungkin membuat mata pelajaran pendidikan Pancasila dalam mata pelajaran tersendiri.

### **B. Integrasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kurikulum PKn (Studi Kasus di Kab. Karanganyar)**

Sebagaimana dijelaskan dalam konsiderans, Lahirnya SK No. 421/2011 dilatar belakangi oleh eksistensi Pancasila sebagai dasar Negara yang semakin terkikis dalam kehidupan sehari-hari terutama pada generasi muda. Oleh karenanya Pancasila sebagai dasar Negara, pandangan hidup, dan falsafah bangsa harus dipahami dan diamalkan secara optimal oleh seluruh komponen bangsa utamanya bagi anak didik.

Optimalisasi pendidikan Pancasila dalam kurikulum sekolah dilakukan dengan menambah paling sedikit satu jam pelajaran Pendidikan Pancasila setiap minggu ke dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Dengan adanya penambahan ini, mata pelajaran PKn menjadi tiga jam dari awalnya yang hanya dua jam. Penggabungan ke dalam mata pelajaran PKn dilakukan mengingat tidak mungkin membuat mata pelajaran baru karena akan dikhawatirkan akan bertentangan dengan kurikulum yang ditetapkan pemerintah pusat.

Untuk melaksanakan SK No.421/2011, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) membentuk Tim untuk menyusun kurikulum dan buku ajar Pendidikan Pancasila. Pelaksanaan tugas ini juga perlu melibatkan pihak-pihak terkait salah satunya perguruan tinggi. Kepala Dikpora kemudian membentuk Tim inti perumus kurikulum dan buku ajar pendidikan Pancasila dari SD-SMA yang terdiri dari:

**Tabel 2. Tim Penyusun Kurikulum Pancasila Kab. Karanganyar**

No	Jenjang	Anggota Tim	Asal Sekolah
1	SD	1. Temon Kinasih	SDN 1 Gemantar
		2. Endag SW.	SDN 1 Ngijo
		3. Hery Mulyadi	UPT Tasik Madu
2	SMP	1. Sutiyono	SMPN 3 Kebakkramat
		2. Sundarumaya	SMPN 3 Karangayar
3	SMA	1. Sugiman	SMAN Colomadu
		2. Suparno	SMKN 2 Karangayar

Pada tanggal 29 Nopember 2011 bertempat di Rumah Dinas Bupati Karanganyar, dilakukanlah pertemuan guru-guru PKn se-Kabupaten Karangnyar untuk membahas konsep kurikulum Pendidikan Pancasila. Pertemuan tersebut mengundang Peneliti Utama Dr. Triyanto, SH. MHum., sebagai narasumber. Pertemuan menyepakati bahwa Pendidikan Pancasila yang akan diterapkan di Kabupaten Karanganyar difokuskan sebagai Pendidikan Moral. Fokus pendidikan moral ini dilatarbelakangi terjadinya dekadensi moral generasi muda yang semakin memprihatinkan.

Menindaklanjuti pertemuan di Rumah Dinas Bupati, anggota Tim inti telah melakukan komunikasi dan diskusi intensif dengan peneliti secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi tidak langsung dilakukan melalui media komunikasi elektronik berupa telepon, SMS, dan surat elektronik (*e-mail*). Adapun komunikasi langsung dilakukan dalam bentuk diskusi dalam sebuah forum FGD (*Focus Group Discussion*) sebanyak tiga kali pada tanggal 18 Juli, 16 Agustus, dan 29 September 2012.

Melalui berbagai komunikasi dan diskusi yang intensif antara Tim dan Peneliti, telah disepakati hal-hal penting yaitu:

1. Penegasan kembali pendidikan Pancasila sebagai pendidikan moral.
2. Penentuan nilai-nilai Pancasila yang hendak diajarkan kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan riil di masyarakat. Pemilihan ini dilakukan karena terdapat banyak sekali nilai-nilai Pancasila sehingga perlu dipilih yang mendesak untuk diajarkan. Nilai-nilai yang disepakati yaitu:
  - a. Sila 1: Ketaatan kepada Tuhan YME.
  - b. Sila 2: Menghargai harkat dan martabat manusia.
  - c. Sila 3: Hidup rukun dalam kebhinekaan.
  - d. Sila 4: Musyawarah dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur.

- e. Sila 5: Kerja keras dan mandiri.
3. Penetapan topik/materi kurikulum yang akan dikembangkan dalam buku ajar. Penetapan materi ini yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengembangan buku ajar.
  4. Penyusunan Buku Ajar pendidikan Pancasila (draft terlampir). Mengingat keterbatasan sumber daya dan sumber dana, maka penelitian ini hanya mengembangkan buku ajar masing-masing satu contoh untuk setiap jenjang pendidikan.

## **SIMPULAN**

Kurikulum PKn yang terdapat dalam KTSP 2006 (SD-SMA) sangat minim sekali mengakomodasi nilai-nilai Pancasila. Dari 52 Standar Kompetensi yang ada, hanya empat yang secara eksplisit menyebut kata-kata Pancasila. Dari keempat inipun hanya dua yang menyebut istilah nilai-nilai Pancasila.

Integrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam PKn berdasarkan SK Bupati Karanganyar No.421/2011 dilakukan dengan menambahkan satu jam pelajaran PKn untuk mata kuliah Pancasila menjadi tiga jam dari awalnya hanya dua jam. Adanya dekadensi moral remaja, menjadi alasan dijadikan Pendidikan Pancasila sebagai wahana pendidikan moral. Pendidikan moral dilakukan dengan menentukan nilai-nilai Pancasila yang mendesak untuk diajarkan sesuai dengan kebutuhan riil di masyarakat yaitu: (1) *Ketaatan kepada Tuhan YME*; (2) *Menghargai harkat dan martabat manusia*; (3) *Hidup rukun dalam kebhinekaan*; (4) *Musyawaharah dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur*; dan (5) *Kerja keras dan mandiri*. Penjabaran dari nilai-nilai ini diwujudkan dalam kurikulum dan buku ajar.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Alberta School. 2005. *The Heart of the Mater: Character and Citizenship Education in Alberta Schools*. Edmonton, Alberta: Alberta Education.
- Azyumardi Azra. 2007. *Keragaman Indonesia: Pancasila dan Multikulturalisme*. Yogyakarta: Makalah Semiloka Nasional Keragaman 13-14 Agustus 2007.
- Daniel Goleman. 2002. *Emotional Intellegence*, alih bahasa oleh T. Hermaya. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Daryono, M. *et al.* 2008. *Pengantar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Depdiknas. 2006. *Permendiknas No.22/2006 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Depdiknas.

- Dick and Carey. 2001. *The systematic design instruction* (5<sup>th</sup> ed.). New York: Longman.
- Hartoonian. 1992. *The Social Studies and Project 2061: An Opportunities for Harmony*, dalam *The Social Studies*, 83;4:160-163.
- Hatta Rajasa. 2009. *Karakter Bangsa Sebagai Modal Sosial Untuk Menghadapi Tantangan Pembangunan Global*. Jakarta: Setneg.
- John J Cogan and Ray Derricott. 1998. *Citizenship for the 21st Century, An International Perspective on Education*. London: Kogan Page Limited.
- John W Creswell. 2008. *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research, Third Edition*. USA: Edwards Brothers, Inc.
- Joseph Zins, Roger R Weissberg, Margaret C. Wang and Herbert J (2001). *Emotional Intelligence and School Success*. [www.thefreelibrary.com](http://www.thefreelibrary.com).
- Katherine Bischooping and Jennifer Dykema. 1999. *Toward a Social Psychological Programme for Improving Focus Group Methods of Developing Questionnaires*. Journal of Official Statistics Vol. 15.
- Mary M Williams. 2000. *Models of Character Education: Perspectives and Developmental Issues*. Journal of Humanistic Counseling, Education, and Development. Vol.1.
- Matthew B Miles and A Micheal Huberman. 1984. *Qualitative Data Analysis, A Sourcebook of New Methods*. Beverly Hills CA: Sage Publications Inc.
- Meredith D. Gall, Joyce P. Gall & Walter R. Borg. 2003. *Educational Research: An Introduction*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Oong Komar. 2009. *Pancasila dan Filsafat Pendidikan Pancasila*, Opini Harian Pikiran Rakyat, Selasa 2 Juni 2009.
- Russell T. Williams dan Ratna Megawangi. 2009. *Dampak Pendidikan Karakter Terhadap Akademik Anak*. Jefferson Center For Character Education-USA dan Indonesia Heritage Foundation. Available in: <http://pondokibu.com/>.
- Sapriya. 2005. *Perspektif Pakar terhadap Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pembangunan Karakter Bangsa (Disertasi)*. Bandung: SPs UPI.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Triyanto. 2010. *Inovasi Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*. Surakarta: UNS Press.
- Udin S.Winataputra. 2001. *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi*, (Disertasi). Bandung: UPI.
- William L Neuman. 2006. *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches, Sixth Edition*. USA: Pearson.